

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pendidikan sangat mempengaruhi akselerasi pembangunan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul hanya bisa dilahirkan dari sistem pendidikan yang bermutu tinggi. Pilar-pilar bernegara seperti politik, ekonomi, dan pertahanan dapat menjadi rapuh serta mudah digoyang oleh kekuatan asing jika sumber daya manusia yang mengisinya dihasilkan dari sistem pendidikan yang tidak memenuhi standar mutu.

Salah satu kewajiban pemerintah adalah menjamin tersedianya sumber daya manusia yang unggul melalui program pembangunan manusia (Arofah & Sishadiyati, 2022). Isu strategis pendidikan era modern ini tidak hanya berputar pada masalah guru/dosen dengan pelajarnya saja, melainkan sudah memasuki sebuah paradoks yang semakin kompleks. Sektor pendidikan pada awal tahun mengalami inflasi tahunan (*year-on-year*) sebesar 2,05 persen, dengan komoditas yang paling berdampak memberi kenaikan adalah uang sekolah jenjang Sekolah Dasar dan uang kuliah akademi/pendidikan tinggi (Badan Pusat Statistik, 2022). Inflasi biaya pendidikan di Indonesia yang tidak seimbang dengan pendapatan per kapita bisa memberi dampak signifikan pada peningkatan beban keuangan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Hal tersebut dapat menjadi masalah jangka panjang pada struktur sosial ekonomi masyarakat.

Tanggung jawab pendidikan pasca reformasi politik 1998 telah membagi kewenangan tidak hanya di tingkat pemerintah pusat saja, namun pendidikan sekarang termasuk tanggung jawab pemerintah daerah. Peran negara baik di tingkat pusat atau daerah sangat dibutuhkan untuk menjamin kualitas pendidikan yang tersedia dengan harga yang terjangkau, hal tersebut selaras dengan tujuan ketiga Indonesia bernegara, yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”.

Sebagai bentuk tanggung jawab otonomi daerah di sektor pendidikan, maka pemerintah daerah harus memiliki rencana atau strategi dalam bidang

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu (Okvianti et al., 2024). Salah satu strategi yang umumnya pemerintah daerah pakai untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan memberi beasiswa bagi pelajar yang dinilai memiliki potensi akademik namun terkendala biaya pendidikan. Salah satu pemerintahan lokal atau daerah yang mengalokasikan dana APBD untuk memberikan beasiswa pada pelajar adalah Pemerintah Kabupaten Jember. Menurut data Indeks Pembangunan Manusia di Jember (2025 sebesar: 71,57) menunjukkan tren positif dalam 5 tahun terakhir, namun masih terpaut jauh oleh Kota Surabaya yang memiliki IPM tertinggi di provinsi Jawa Timur yaitu 84,69 (BPS-Jember-IPM, 2025). Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Jember perlu melakukan intervensi melalui kuasa kebijakan untuk lebih meningkatkan angka IPM di tahun-tahun mendatang.

Program Beasiswa Cinta Bergema Kabupaten Jember menargetkan kalangan mahasiswa aktif dengan identitas KTP Jember baik ditingkat D3, D4 dan S1 melalui enam jalur beasiswa, yaitu beasiswa prestasi, afirmasi ekonomi, guru dan perangkat desa/daerah, kompetisi, santri pondok pesantren dan penghafal Al Qur'an, serta beasiswa khusus (Jember & Fawait, 2025). Berdasarkan penetapan ke enam jalur beasiswa tersebut, ada indikasi awal bahwa kebijakan beasiswa ini cenderung hanya mengakomodasi kelompok masyarakat dengan latar belakang agama tertentu sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Jember. Golongan santri yang latar belakangnya kental dengan pendidikan kultural khas pesantren tradisional membutuhkan sentuhan khusus dari pemerintah agar setara dalam hal daya saing dengan pelajar lain yang berlatar belakang pendidikan lebih modern. Uang negara dalam bentuk APBD diprioritaskan untuk beberapa lapisan masyarakat yang dinilai membutuhkan intervensi lebih dari pemerintah.

Penentuan skala prioritas oleh pemerintah daerah Jember terhadap kriteria penerima beasiswa menjadi fenomena menarik untuk diteliti lebih mendalam, terutama sebagai bentuk strategi pemerataan pembangunan. Secara normatif, adanya beasiswa Cinta Bergema ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk komunikasi dan pembangunan citra kepala daerah saja, tapi benar-benar menyentuh akar masalah pendidikan di Kabupaten Jember. Indikasi awal adanya agenda

terselubung perlu dipinggirkan dulu sementara untuk urusan pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang.

Penentuan skala prioritas oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam menetapkan kriteria penerima Program Beasiswa Cinta Bergema menjadi fenomena yang penting untuk dikaji, karena mencerminkan bagaimana pemerintah mendefinisikan kelompok sasaran dan memprioritaskan distribusi manfaat kebijakan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Secara normatif, program beasiswa diharapkan mampu menjawab persoalan akses pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jember. Namun demikian, desain kebijakan tersebut juga perlu ditelaah secara kritis untuk mengetahui apakah orientasi yang dibangun semata-mata berfokus pada penyelesaian persoalan pendidikan atau turut memuat dimensi lain, termasuk kemungkinan adanya orientasi komunikasi politik atau pencitraan pemerintah daerah.

Program beasiswa dari pemerintah pada umumnya disambut antusias oleh kalangan mahasiswa, mereka menunjukkan rasa tanggung jawab atas beasiswa yang didapat dengan lebih giat belajar dan tetap mengejar prestasi (Alviyah et al., 2023). Oleh karena itu, penyelenggaraan program beasiswa perlu dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Dalam konteks Program Beasiswa Cinta Bergema, menarik untuk dikaji bagaimana pemerintah daerah merepresentasikan persoalan pendidikan melalui desain kebijakan, penetapan kategori penerima, dan berbagai ketentuan program yang menyertainya. Selain itu, penelitian ini juga mempertanyakan apakah desain kebijakan tersebut semata-mata berorientasi pada perluasan akses pendidikan atau turut memuat orientasi lain dalam implementasinya.

1.2 Rumusan Masalah

Beasiswa Cinta Bergema merupakan upaya pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, program ini berpotensi tidak fokus pada masalah yang substantif. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

bagaimana masalah pendidikan direpresentasikan dalam kebijakan beasiswa Cinta Bergema?.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis konstruksi masalah kebijakan beasiswa Cinta Bergema di Kabupaten Jember dengan pendekatan Carol Bacchi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dari berbagai perspektif, termasuk perspektif teoretis, praktis, akademis, dan sosial. Secara teoretis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya kajian kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan yang direpresentasikan dalam kebijakan beasiswa Cinta Bergema. Melalui penerapan teori Analisis Kebijakan Kritis Carol Bacchi, penelitian ini membuka jalan baru untuk berpikir tentang bagaimana kebijakan dipahami tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai arena wacana dan konstruksi makna yang memengaruhi praktik sosial.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengevaluasi arah dan efektivitas Program Beasiswa Cinta Bergema. Temuan ini dapat digunakan sebagai refleksi dalam memperkuat desain kebijakan pendidikan untuk lebih mendukung pemerataan kesempatan belajar, terutama bagi kelompok dengan akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas. Dari perspektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan administrasi publik dan studi kebijakan publik dalam perumusan masalah, terutama bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang tertarik untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan pendidikan lokal beroperasi dalam konteks sosial dan politik dunia nyata. Sementara itu, secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya partisipasi masyarakat dan pengawasan kebijakan pendidikan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan beasiswa dirancang dan diimplementasikan, publik dapat menilai secara lebih kritis apakah kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka.